

**ISLAM DAN NEGARA INDONESIA
(Studi Kajian Politik Pendidikan Islam di Indonesia)**

Aidul Azhari Harahap¹, Sehat Sultoni Dalimunthe²

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Email: aidulazhariharahap163@gmail.com

Abstract

Islam and the state are two things that cannot be separated in Islamic scholarship as a manifestation that Islam is not only a religion that monotonously discusses matters of worship, but in it includes various matters concerning the state and its role as guide for the state to become a vessel for a prosperous, safe society. and prosperous. Islam in Indonesia has become one of the manifestations in the application of a plural state to religion and culture so that in its history Indonesia has failed as a sharia-based product but instead has sought shortcuts so that it eventually becomes a country with a democratic system. The purpose of this study is to find out the extent to which the relationship between Islam and the state is studied in the politics of Islamic education in Indonesia and find out the real editorial that Islam is one of the pioneers of Indonesian independence.

Keyword: *Islam, State, Islamic Politics, Indonesia*

Abstrak

Islam dan negara merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan dalam keilmuan Islam sebagai wujud bahwasanya Islam bukan hanya sebagai agama yang monoton membahas tentang masalah ibadah, melainkan di dalamnya mencakup berbagai soal tentang negara dan perannya sebagai pengarah negara menjadi sebuah wadah masyarakat yang makmur, aman, dan sejahtera. Dengan demikian, antara Islam dan negara terdapat sinerjinitas yang terjadi sejak Islam sebagai sebuah agama samawi yang dibawakan Rasulullah SAW di Makkah pada 700 M. Islam di negar Indonesia menjadi salah satu wujud dalam pengaplikasian negara plural atas nama agama dan budaya sehingga dalam sejarahnya Indonesia gagal sebagai produk yang berbasis syara' melainkan mencari jalan pintas sehingga akhirnya menjadi negara yang bersistem demokrasi. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara Islam dan negara yang dikaji dalam politik pendidikan Islam di Indonesia dan mengetahui redaksi nyata bahwa Islam adalah salah satu pelopor kemerdekaan Indonesia dan tidak dapat dilepaskan dari hubungan yang erat antara Islam dan bernegara sejak dahulunya.

Kata Kunci: *Islam, Negara, Politik Islam, Indonesia*

PENDAHULUAN

¹Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Angkatan Tahun 2022.

²Dosen Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Perjalanan sejarah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran aktif Islam dalam melengkapi berbagai literturnya mulai dari masalah politik, budaya dan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia hingga saat ini. Kesepakatan sejarah Islam Indonesia telah menyebutkan bahwasanya Islam masuk pertama kali ke Nusantara pada periode abad ke-7 M melalui proses perdagangan dari tanah Gujarat hingga kemudian hari banyak para pedagang muslim yang telah menetap dan berdomisili (tinggal) di Nusantara dengan melakukan pernikahan dengan para wanita pribumi Nusantara.

Islam menjadi salah satu gerakan ideology agama yang berkembang pesat hingga akhirnya berdirinya berbagai kerajaan bercorak Islam yang dimulai dari tanah Aceh hingga kepenghujung Indonesi yaitu Jayapura. Kerajaan pertama ini berdiri pada sekitaran tahun 1267 M di Nangroe Aceh Darussalam yang disebut dengan Kesultanan Samudra Pasai. Setelah mengalami kemunduran yang cukup signifikan, kemudian pada kisaran tahun 1496 M berdiri Kerajaan Islam Aceh Darussalam.³ Perkembangan Islam yang begitu signifikan di Nusantara dapat memberikan gambaran bahwa pengaruh positif politik umat Islam sangat baik dalam berbagai periodenya sehingga dapat berkembang dengan begitu pesat hingga ke tanah jawa bahkan sampai ke Jayapura.⁴

Sejarah panjang Islam di Aceh sejak abad ke-7 M atau sejak abad ke-13 M telah banyak melakukan berbagai terobosan mulai dari masalah politik, maupun dalam masalah pendidikan Islam yang dijadikan sebagai basis perkembangan yang tetap sejalan dengan kehidupan bermasyarakat di Nusantara melalui penerapan hukum syariat. Kemudian, kemajuan politik Islam dalam kenegaraan terlihat bahwa Islam telah ada hubungan diplomasi atau hubungan internasonal baik itu ke China, India, Eropa atau Turki, kemudian dalam pendidikan telah adanya lembaga pendidikan Islam sebagai basis melahirkan berbagai cerdas pandao Muslim baik itu yang berperan sebagai penyebar ajaran agama Islam atau sebagai tampuk pimpinan kejarannya begitu juga dengan masalah adat budaya, Islam telah berhasil dalam

³Rahayu Permana, "Sejarah Masuknya Islam Ke Indonesia," *Jurnal Dinus* 01, no. 01 (2015): 1–27.

⁴Mohamadon D. Husen, "Islam Dan Filosofi Masyarakat Fakfak," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Volume. 4, Nomor. 1 (25 Mei 2018): 25–47.

menyatukan diri dengan adat budaya daerah dengan baik sehingga dapat diterima secara terbuka oleh masyarakat pribumi di tanah Nusantara.⁵

Islam cukup diterima dengan baik oleh masyarakat pribumi sebagai salah satu kontestan dalam perjalanan adat budaya dan pengaruh politik dalam berbagai hubungannya. Perjalanan Islam dalam sejarahnya sangat memberikan pengaruh yang sangat baik. Berbagai kerajaan Islam yang telah berdiri baik di tanah Sumatera maupun Jawa memiliki peran penting dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1945 M. Berbagai sepaik terjang ini adalah salah satunya terbentuknya para Ulama dan Cendekiawan Muslim yang cukup berpengaruh di Indonesia sejak dahulu. Hal ini karena Islam tidak hanya menjadi wadah dalam masalah Politik, namun juga dalam masalah Budaya, Pendidikan dan Nasionalisme.

Kenyataannya sejak dahulu perdebatan terkait dengan hubungan antara agama dan negara menjadi salah satu perdebatan panas hal ini karena banyak yang menganggap bahwa agama dan negara tidaklah memiliki ikatan karena agama dapat menghambat perkembangan suatu negara.⁶ Hal ini diakibatkan oleh adanya gerakan renaissance Eropa pada abad ke 14 hingga 17 M, pada masa-masa itu Eropa dalam masa kegelapan (Dark Age) karena jauhnya dari keilmuan dan gereja melakukan pembantaian kepada pembangkang yang notabene adalah pelaku dan para tokoh pembaharuan di Eropa yang mencoba melawan kekuatan di bawah naungan gereja.

Menurut pemikiran Al-Mawdudi, Islam dan negara bukan hanya sebagai keyakinan namun memiliki cakupan pada pola yang lengkap yang mengatur kehidupan manusia agar tetap pada koridornya. Hal ini dikarenakan dalam Islam terdapat suatu aspek pemikiran yang mencakup kepada berbagai kajian nilai-nilai etika, moral, politik, ekonomi, budaya dan sosial kemasyarakatan. Begitu pula dalam pemikiran Ibnu Khaldun bahwa peran agama dalam bernegara sangat penting karena mampu dalam menciptakan solidaritas di kalangan masyarakat sehingga

⁵Aisyah Nursyarief, "Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah (Perspektif Kerajaan Islam)," *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 17, no. 2 (15 Desember 2014): 256–71.

⁶Moh Dahlan, "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 1–28, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v14i1.635>.

menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi rakyatnya.⁷ Secara umum, dalam pemikiran Islam hubungan antara agama dan negara tidak dapat dilepaskan begitu saja karena agama memiliki peranan penting dalam menciptakan kestabilan bernegara baik oleh pemangku kepentingan, politikus, dan negarawan serta para ilmuwan. Sejak dahulu telah dicetuskan bahwa tanpa adanya sebuah negara maka tidak dapat tercipta sebuah kerukunan dan proses penerapan hukum yang mutlak, hal ini tercermin dalam sejarah Rasulullah SAW dalam mendirikan negara Madinah sebagai basis dakwah dan politik Islam di tanah Jazirah Arab.

Pembahasan makalah ini akan mencakup kepada bahasan tentang masalah Islam dan negara dalam pandangan Islam dan kedudukan Islam dalam suatu negara yang dikaji dalam politik Islam di Indonesia. Negara Indonesia sejak berdiri tidak dapat dilepaskan dari pengaruh serta peranan para pemikir Islam di Indonesia sehingga berdirinya suatu negara berdaulat yaitu berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kajian ini akan dibahas secara *library research* baik itu dalam buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan berbagai literature dalam masalah pembahasan ini.

ISLAM DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Relasi Islam Sebagai Agama dengan Negara

Sejak dahulu pembahasan ini seakan-akan tidak pernah selesai sebagai kajian dalam dunia ilmiah, baik oleh kalangan akademisi maupun tokoh gerakan kenegaraan yang menganggap bahwa antara agama dan negara tidak ada suatu ikatan yang erat diantara keduanya. Bahkan secara brutal disebutkan bahwa agama menjadi penghambat bagi manusia dalam berekspresi sesuai keinginannya dalam mencapai suatu kebahagiaan berpikir dan bertindak sesuai keinginannya.

Munculnya sikap tersebut tidak dapat dilepaskan dari akibat gerakan baru di dunia Eropa ketika abad pertengahan akhir. Hal ini dikarenakan tidak mulusnya perilaku dan tindakan yang diambil para sarjana Barat yang telah belajar ke dunia Islam untuk melakukan berbagai pembaharuan pemikiran dan kepercayaan

⁷Mahmud Ishak, "Hubungan Antara Agama Dengan Negera Dalam Pemikiran Islam", *Jurnal Tahkim*, Volume. 10, Nomor. 2, Desember 2014.

terhadap mitos dan mitologi yang merajalela di kalangan masyarakat Barat ketika itu yang notabene berada di dalam naungan Gereja. Setiap perbuatan yang memiliki keberterangan dengan tindakan Gereja dianggap tidak etis dan akan dilakukan penangkapan terhadapnya sehingga masa-masa gelap itu, para sarjana Barat sudah menganggap bahwa kegiatan keagamaan di dunia Barat dianggap sebagai perilaku penghambatan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.⁸

Pandangan ini jauh berbeda dengan pandangan para sarjana Islam dahulu dan sekarang terkecuali yang telah terpengaruhi oleh pemikiran Barat tentang relasi agama dengan negara. Padahal dalam sejarahnya tanpa adanya kerajaan Islam (negara Islam) di Spanyol ketika masa jayanya dunia Barat tidak pernah mengenal ilmu pengetahuan dan tidak akan terjadinya gerakan renaissance sejak abad ke-14 hingga abad ke-17 di Eropa (Barat).⁹ Hal ini menandakan betapa kuatnya pengaruh agama dalam perkembangan ilmu pengetahuan ketika Islam dalam masa jayanya yang selalu menuntut umatnya untuk selalu berpikrit dan bertindak sesuai dengan kemampuannya selama itu tidak menyalahi hukum asal syara’.

Menurut Ibnu Khaldun, agama dan negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan begitu saja karena tanpa adanya agama, sebuah negara tidak akan memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan moral, etika dan budaya masyarakat. Selain itu, dengan adanya agama dalam pengaruh kepemimpinan sebuah bernegara akan menciptakan dorongan moral yang baik, pemersatu dan menjadi legitimitasi politik sehingga tercermin sebuah tindakan yang sehat demi kepentingan bersama bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok.¹⁰ Begitu pula dalam pandangan Imam Algazali bahwa antara agama dan negara dua anak kembar yang tidak dapat dipisah karena keduanya mempunyai asal dan tujuan yang sama. Menurut pemikiran Al-Mawdudi, Islam dan negara bukan hanya sebagai keyakinan namun memiliki cakupan pada pola yang lengkap yang mengatur kehidupan manusia agar tetap pada

⁸Saifullah, “Renaissance Dan Humanisme Sebagai Jembatan Lahirnya Filsafat Modern,” *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (1 Desember 2014): 133–44, <https://doi.org/10.24014/jush.v22i2.731>.

⁹ Irzak Yuliardy Nugroho dan Riani Muarafah Jannati, “Islam Di Spanyol : Jembatan Peradaban Islam Ke Benua Eropa Dan Pengaruhnya Terhadap Renaissance,” *HUMANISTIKA : Jurnal Keislaman* 7, no. 2 (30 Juni 2021): 190–219, <https://doi.org/10.55210/humanistika.v7i2.522>.

¹⁰ Ahmad Khalwani, “Relasi Agama dan Negara Dalam Pandangan Ibnu Khaldun,” *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 2, no. 2 (19 Desember 2019): 107–20.

koridornya. Hal ini dikarenakan dalam Islam terdapat suatu aspek pemikiran yang mencakup kepada berbagai kajian nilai-nilai etika, moral, politik, ekonomi, budaya dan sosial kemasyarakatan.¹¹

Di Indonesia sendiri sejak era kemerdekaan hingga sekarang masih tetap mengalami kotomi dan pertentangan tentang pemikiran relasi erat antara agama dan negara bahkan dalam sejarah perjalanan pendirian negara Indonesia mengalami pertikaian antara kaum nasionalis dan agamis. Hingga pada akhirnya tumbuh suatu kesepakatan bahwa Indonesia didirikan atas asas Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar bernegara yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan umat Islam yang menandakan bahwa Islam bercampur dalam sistem kenegaraan. Namun, demikian pada akhirnya pergejolakan itu tetap muncul karena dianggap bahwa pendiri bangsa telah mengkhianati perjanjian dahulu dengan menetapkan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum dalam bernegara.

Dengan demikian, dalam pandangan Islam secara umum dipertunjukkan bahwa betapa kuatnya hubungan antara Islam dan jiwa bernegara karena dengan adanya agama dalam sistem bernegara akan memberikan suatu celah dalam tindak ketidakadilan karena telah mengotori sistem hukum agama, budaya, dan demokrasi dalam pemahaman Islam. Pentingnya relasi kuat itu ditujukan untuk terciptanya kerselarasan beragama, bernegara dan pengembangan serta kesejahteraan.

Kilas Balik Sejarah Islam di Indonesia

Secara umum dipahami bahwa peran aktif Islam dalam sejarah Indonesia tidak dapat dilepaskan hal ini bukan saja karena Islam adalah mayoritas umat beragama di Indonesia namun peran aktif pada cendekiawan muslim dahulu telah menjadi salah satu sebab kuatnya pendirian Indonesia. Selain itu, lekatnya adat budaya Nusantara adalah dipengaruhi oleh nilai dan ajaran Islam yang dijadikan masyarakat sebagai kebiasaan yang tidak dapat dilepaskan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di seluruh dunia. Pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat Muslim mencapai 207 juta orang, sebagian besar menganut Islam aliran *Ahlul*

¹¹ Agustina Damanik, "Konsep Negara Menurut Abu A'la Al-Maududi," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): 95–110.

Sunnah Wal Jama'ah. Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat Muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia dan juga mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia adalah memeluk agama Islam yaitu hampir sekitar 90% dari populasi penduduk Indonesia.¹² Kendati demikian, walaupun mayoritas berpenduduk agama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam melainkan sebagai negara kesatuan dengan memakai demokrasi sebagai sistem dalam bernegaranya.

Proses Islamisasi di Indonesia telah berlangsung selama berabad-abad lalu yaitu sekitar abad ke-7 M dan terus berlanjut hingga saat ini. Islam menjadi sebuah kekuatan besar yang berpengaruh melalui serangkaian gelombang dalam berjalannya sejarah. Gelombang-gelombang ini diantaranya dengan melalui proses perdagangan internasional, pendirian berbagai kesultanan Islam yang berpengaruh, dan gerakan-gerakan sosial.¹³ Proses penyebaran Islam di mulai dari jalur perdagangan hingga proses pernikahan antara penduduk yang datang dengan penduduk pribumi. Hingga memasuki abad ke-13 M, kerajaan-kerajaan Islam mulai bermunculan di Nusantara seperti Samudra Pasai di Aceh, Mataram di Jawa, Kesultanan Ternate di Sulawesi dan lain sebagainya. Persebaran Islam dimulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi hingga kemudian Islam mulai menyebar di Papua sekitar abad ke-17 M.¹⁴

Islam masuk ke Sumatera (Selat Malaka) melalui jalur perdagangan atau yang disebut dengan jalur sutera sebagai lintasan perdagangan internasional paling lama di wilayah Nusantara. Masyarakat Islam yang berdagang di Selat Malaka ini kebanyakan berasal dari perantauan atau orang-orang Gujarat, India yang memiliki rute perdagangan hingga ke tanah Cina. Sehingga dapat dipahami bahwa di wilayah Nusantara secara khusus bahwa penyebaran Islam dimulai dari tanah Sumatera atau Malaya sebagai cikal bakal berdirinya berbagai kerajaan Islam besar di Nusantara

¹²<https://www.indonesia-investments.com/id/>, diakses pada 10 Mei 2023 Pukul 20.15 WIB.

¹³Toto Suharto, "Indonesianisasi Islam; Penguatan Islam Moderat Dalam Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Tahir*, Volume. 17, Nomor. 1, (Mei 2017); 155-178.

¹⁴Abdul Mujib, "Sejarah Masuknya Islam dan Keragaman Kebudayaan Islam di Indonesia", *Jurnal Dewantara*, Volume. 11, Nomor. 1, (2021), hlm. 118-119.

yang menjadi sebab mudahnya Islam mneyebar hingga ke Jayapura.¹⁵ Selain itu, penduduk Islam berada di wilayah Sumatera (wilayah paling barat Indonesia) dan paling sedikit berada di Papua (wilayah paling timur Indonesia).

Islam menjadi agama terbesar di Indonesia, dan Wilayah Barat Indonesia yang padat penduduknya pada umumnya memiliki jumlah penduduk Muslim yang lebih besar dibandingkan dengan Wilayah Timur Indonesia. Hal ini karena perdagangan memiliki peranan yang signifikan dalam proses Islamisasi di tanah Nusantara (Indonesia), pulau-pulau yang paling dekat dengan rute perdagangan utama menerima lebih banyak pengaruh Islam. Wilayah barat Indonesia, yang telah menjadi bagian dari jalur perdagangan global sejak sejarah awal manusia, lebih banyak menerima pengaruh Islam yang disebarkan melalui proses dagang, dan karena hal itu mengalami proses kebangkitan dan kejatuhan kesultanan-kesultanan Islam sejak abad ke-13 M.¹⁶

Sejarah Islam di Indonesia mengalami proses khidmat karena dilalui proses perdagangan bukan melalui penaklukan. Hal ini menjadikan Islam yang berada di Indonesia mengalami proses persebaran yang cukup lama dan metode yang digunakan pada umumnya adalah melalui proses tasawuf atau penyesuaian dengan adat budaya setempat secara umum, sehingga pengalaman beragama di Indonesia mengalami perbauran dengan adat budaya lama.

Islam dan Indonesia memiliki satu kesatuan utuh sejak sebelum menjadi negara kesatuan dan masih berada pada proses perkembangan sejak periode para kerajaan Nusantara dahulu di tanah ini, mulai dari kearajaan Hindu-Budha, hingga telah berdirinya berbagai kerajaan Islam terbesar yang menyebar di seluruh tanah Nusantara mulai dari pinggiran Sumatera hingga pedalaman tanah Papua secara bertahap. Perkembangan kemudian terjadi dalam ranah politik Islam secara berangsur-angsur sejak Indonesia pra merdeka hingga kemudian merdeka pada tahun 1945 secara *de facto de jure*.

¹⁵Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam di Indonesia; Historis dan Eksistensinya*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 22-24.

¹⁶Taufik Abdullah, et.al, *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia; Akar Historis dan Awal Pembentukan Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2015), hlm. 41-45.

Politik Umat Islam dalam Sejarah Indonesia

Politik Islam dalam sejarah perjalanan Indonesia salah satunya ditandai dengan adanya lembaga pendidikan Islam sebagai cikal bakal proses lahirnya para Muslim *kaffah* dalam mempengaruhi perkembangan Indonesia kedepannya, lalu pada penetapan landasan negara peran aktif pada cendekiawan muslim tidak dapat dipungkiri dalam sejarah Indonesia.

1. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Gerakan pemikiran pendirian negara Islam telah terjadi sejak lama hingga pada tahun 1928 M, para pemuda dan pejuang bangsa mencetuskan keinginan untuk merdeka, menentukan sendiri nasib bangsanya, memiliki sebuah negara kesatuan dengan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Peristiwa ini dikenal sebagai kejadian “Sumpah Pemuda”. Semangat persatuan dan kesatuan ini melahirkan Pancasila setelah 17 tahun kemudian yaitu tepatnya pada 1 Juni 1945 sebagai dasar negara.¹⁷

Pancasila sebagai dasar sebagai menerima keragaman, diterima, diakui, dan dikembangkan dalam negara plural Pancasila, dengan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia sebagai pengikat bangsa dan satu semangat persatuan yaitu “*Bhinneka Tunggal Ika*”. Perdebatan dimulai ketika kalimat Piagam Jakarta yang berbunyi “*Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” yang pada akhirnya dihapus.¹⁸ Pancasila sebagai jalan keluar paling tepat untuk mempersatukan semuanya. Dalam Pancasila, ada kesatuan dari keberagaman unsur bangsa untuk kepentingan bersama, kesatuan arah, dan tujuan negara.

Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia dilahirkan, para pejuang kemerdekaan negara sudah mempertimbangkan kemungkinan Indonesia untuk menggunakan agama mayoritas yaitu Islam sebagai dasar negara, namun hal itu

¹⁷Aqil Teguh Pathani, “Agama Musuh Pancasila?; Studi Sejarah dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila”, *Jurnal Al-Qalam*, Volume. 26, Nomor. 1 (2020), hlm. 119.

¹⁸Qisthi Faradina Ilma Mahnani, dkk, “Islam dan Politik di Indonesia (Perspektif Sejarah)”, *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, Volume. 1, Nomor. 2 (Juni 2022); 1-199.

dianggap kurang tepat karena keberagaman budaya dan agama di Nusantara. Kemudian atas kesepakatan bersama, panitia sembilan yang diketuai Sukarno menggantikan kalimat “*Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” dengan “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”.¹⁹

Perumusan Pancasila menjadi awal dan langkah bagi tokoh Islam Indonesia dalam mewujudkan Indonesia yang islami. Para tokoh Panitia Sembilan diantaranya adalah Moh. Natsir yang awalnya ingin mengubah Indonesia menjadi negara Islam, namun gagal total. Kemudian, ada tokoh seperti Mohammad Hatta, Mohammad Roem, dan beberapa tokoh Islam yang lainnya turut dalam diskusi persiapan kemerdekaan. Para pejuang bangsa Indonesia ketika itu sudah mampu membedakan antara konsep bernegara dengan keIslaman sebagai keyakinan. Walaupun sebagai seorang nasionalis, Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia adalah pemimpin Muslim pertama di dunia yang melafazkan ayat suci Alqur’an di dalam mimbar sidang PBB pada tahun 1945.²⁰

2. UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara

Sejak Indonesia berada di bawah Kerajaan Belanda dengan sebutan “Hindia-Belanda”, berbagai gerakan cendekiawan muslim telah dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan. Pada 7 September 1944, Jepang melakukan perjanjian terbuka terhadap kemerdekaan Indonesia sebagai akibat dari kalah perangnya Kekaisaran Jepang oleh Amerika Serikat. Hal ini dijadikan sebagai kesempatan dalam deklarasi Indonesia sebagai negara merdeka pada 1 Maret 1945, dan membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945 di Jakarta.²¹ Hal ini sebagai

¹⁹Mu’arrif, “Muhammadiyah dan Pancasila; Ki Bagus Hadikusuma dan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa”, *Berita Muhammadiyah*, diakses dari <https://ump.ac.id/>, pada 14 Mei 2023.

²⁰Zudi Setiawan, “Peran Tokoh Nahdhatul Ulama Dalam Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Spektrum*, Volume. 18, Nomor. 2, (2021), hlm. 84-87.

²¹Qisthi Faradina Ilma Mahnani, “Pemikiran Ki Bagus Tentang Islam dan Negara Dalam Perumusan Dasar Negara Indonesia (1945-1953)”, *Jurnal El-Tarikh*, hlm. 5.

bentuk respon terhadap Pemerintahan Jepang dalam memberikan ruang kepada Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan.

BPUPKI dibentuk dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Anggota dalam BPUPKI terdiri dari 62 anggota yang terdiri dari kaum nasionalis dan Islam. Sejak BPUPKI dibentuk, Moh. Natsir dan Sukarno mengalami perdebatan dengan negara dan Islam baik dalam siding BPUPKI maupun dalam majalah harian nasional yang saat itu adalah *Panji Islam*. Mohammad Natsir ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, sedangkan Sukarno ingin pisahkan antara agama dan negara. Hal ini menjadi perdebatan panjang hingga kemudian disepakati bahwa Indonesia adalah negara kesatuan.²²

Kesepakatan itu muncul atas dasar bahwa Indonesia adalah negara yang plural sehingga yang menonjol dalam persidangan BPUPKI adalah rasa atau perasaan kesatuan antara sesama, dan semua anggota memahami azas dan bentuk negara yang akan dibentuk dalam negara Indonesia itu nanti. Banyak hal telah dilakukan oleh cendekiawan muslim dalam perumusan negara dengan berdasarkan kepada Alqur'an dan hadits sebagai wujud untuk menciptakan negara berdaulat dan islamiya. Hal ini terlihat dari berbagai peran penting para tokoh NU dan Muhammadiyah dalam siding BPUPKI namun karena para anggotanya kebanyakan dari kaum nasionalis sehingga para cendekiawan muslim sepakat untuk menciptakan negara kesatuan sebagai wujud kesatuan dan persatuan.

3. Perguruan Tinggi Islam

Politik selanjutnya adalah dengan mendirikan Perguruan Tinggi Islam (PTI) sebagai basis ideologi keislaman yang menjadi saingan perguruan tinggi umum di Indonesia. Perguruan Tinggi Islam (PTI) pertama di Indonesia setelah kemerdekaan adalah Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta yang didirikan sekitar

²²Sasmita dan Edi Rosman, "Implementasi Politik Hukum Islam Dalam Perumusan Piagam Jakarta", *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Volume. 2, Nomor. 1, (Januari-Juni 2018), hlm. 7-9.

8 Juli 1945 sebagai wujud dalam menciptakan generasi Islam yang berilmu. Pelopor pertama dalam mendirikan Universitas Islam di Indonesia adalah Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir, hal ini telah direncanakan sejak Belanda melakukan politik etis dalam meminimalisir pergerakan Islam.²³ Selain itu, wujud gerakan ini adalah sebagai sambutan hangat dari Timur Tengah yang mengalami pergerakan besar-besaran dalam keilmuan Islam.²⁴ Hal ini menjadi cikal bakal berkembangnya pendidikan Islam di Indonesia.

Langkah selanjutnya dilakukan secara konstitusi untuk mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang lebih sah secara hukum nasional yaitu keluarnya Peraturan No. 34 Tahun 1950 yang menjadikan berubahnya Sekolah Tinggi Islam Yogyakarta menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) kemudian pada tahun 1960-an PTAIN menjadi IAIN karena pendidikan Islam tidak hanya mencakup kepada satu bidang saja melainkan menjadikan berbagai kajian keilmuan lainnya sebagai basisnya. Perkembangan selanjutnya adalah bahwa tingkatan Perguruan Tinggi Islam dimulai dari UIN, IAIN, STAIN yang menjadi basis dalam pengembangan intelektualitas kaum Muslim.²⁵

Muhaimin sebagaimana telah dikutip Amiruddin, ia mengatakan bahwa aspirasi umat Islam pada umumnya dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam pada awal mulanya didorong oleh beberapa tujuan. *Pertama*, untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu agama Islam pada tingkat yang lebih tinggi secara lebih sistematis dan terarah. *Kedua*, untuk melaksanakan pengembangan dan peningkatan dakwah Islam. *Ketiga*, untuk mereproduksi dan kaderisasi ulama dan fungsionaris keagamaan, baik pada kalangan birokrasi negara maupun sektor swasta serta lembaga-lembaga sosial, dakwah, pendidikan dan sebagainya.²⁶

²³Pairin, "Sejarah Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam", *Jurnal Shautut Tarbiyah*, Volume. 18, Nomor. 2, (2012), hlm. 124.

²⁴Sofyan Rofi, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 22-25.

²⁵Pairin, *Op. Cit*, hlm. 124-127.

²⁶Amiruddin, "Dinamika Lembaga Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia", *Jurnal Miqot*, Volume. XLI, Nomor. 1 (Januari-Juni 2017), hlm. 103.

Jika dilihat dari perjalanan sejarahnya, maka umat Islam Indonesia mendirikan perguruan tinggi Islam pertama, yakni Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta tahun 1945. Kemudian, STI ditransformasi menjadi Universitas Islam Indonesia (UII), yang didirikan pada tahun 1948 di Yogyakarta. Selanjutnya, pemerintah mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) tahun 1951 di Yogyakarta. Di samping itu, pemerintah mendirikan ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama) di Jakarta tahun 1957.²⁷

Hasil perkawinan kelembagaan antara PTAIN dan ADIA diberi nama IAIN (Institut Agama Islam Negeri) atau '*al-Jâmiyah al-Islâmiyah al-Hukûmiyah*', didirikan tahun 1960 di Yogyakarta. Kemudian, cabang IAIN di daerah ditingkatkan statusnya oleh pemerintah pada tahun 1997 menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Pada tahun 2002, dimana IAIN dan STAIN dikonversi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Setidaknya ada 7 argumentasi yang memotivasi terjadi konversi IAIN dan STAIN menjadi UIN. Tentunya, argumentasi ini lahir untuk mengemukakan berbagai aspek yang melatarbelakangi konversi PTKIN di Indonesia dan melihat perjalanan PTKIN dalam pentas sejarah bangsa Indonesia. Argumentasi perubahan kelembagaan PTKIN tersebut diantaranya adalah terkait masalah politik, sosial-ideologis, kelembagaan, dunia kerja, keilmuan, pembangunan bangsa dan negara, kompetisi global, dan prinsip keterbukaan.²⁸

Sehingga dapat dipahami bahwa dalam mewujudkan cita-cita bangsa dilakukan dengan mendirikan lembaga pendidikan sebagai basis dalam tingkatan nasional untuk menciptakan generasi Islam yang cerdas dan nasionalis secara umum selain menjadi atau mewujudkan cita-cita kaum intelektual Muslim.

KESIMPULAN

Islam dan negara Indonesia memiliki satu kesatuan utuh sejak sebelum menjadi negara kesatuan dan masih berada pada proses perkembangan para

²⁷*Ibid*, hlm. 108.

²⁸Hasbi Indra, "Pendidikan Tinggi Islam dan Peradaban Indonesia", *Al-Tahrir*, Volume. 16, Nomor. 1, (Mei 2016), hlm. 127-131.

kerajaan Nusantara dahulu di tanah ini, mulai dari kearajaan Hindu-Budha, hingga telah berdirinya berbagai kerajaan Islam terbesar yang menyebar di seluruh tanah Nusantara. Perkembangan kemudian terjadi dalam ranah politik tanah air Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang Islami dan walaupun pada akhirnya menjadi negara kesatuan. Begitu pula dalam perjalanan perpolitikan di Indonesia yang dimulai dari proses pendirian bangsa dan diskusi seputar landasan bernegara yang dicantumkan di dalam Pancasila dan UUD 1945 menjadi salah satu upaya untuk memberikan citra Islam di dalam bernegara di Indonesia yang dilalui melalui proses politik para cendekiawan muslim Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib, “Sejarah Masuknya Islam dan Keragaman Kebudayaan Islam di Indonesia”, *Jurnal Dewantara*, Volume. 11, Nomor. 1, 2021.
- Aisyah Nursyarief, “Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah (Perspektif Kerajaan Islam),” *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* Volume. 17, No. 2, 15 Desember 2014.
- Amiruddin, “Dinamika Lembaga Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia”, *Jurnal Miqot*, Volume. XLI, Nomor. 1, Januari-Juni 2017.
- Aqil Teguh Pathani, “Agama Musuh Pancasila?; Studi Sejarah dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila”, *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 26, No. 1 2020.
- Dahlan, Moh. “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 1–28. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v14i1.635>.
- Damanik, Agustina. “Konsep Negara Menurut Abu A’la Al-Maududi.” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): 95–110. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v5i1.1720>.
- Daulay, Haidar Putra, *Pendidikan Islam di Indonesia; Historis dan Eksistensinya*, Jakarta: Kencana, 2019.
- D.Husen, Mohamadon. “Islam Dan Filosofi Masyarakat Fakfak.” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (25 Mei 2018): 25–47. <https://doi.org/10.5281/wahanaislamika.v4i1.15>.
- Hasbi Indra, “Pendidikan Tinggi Islam dan Peradaban Indonesia”, *Al-Tahrir*, Volume. 16, Nomor. 1, Mei 2016.

<https://www.indonesia-investments.com/id/>, diakses pada 10 Mei 2023 Pukul 20.15 WIB.

Khalwani, Ahmad. "Relasi Agama dan Negara Dalam Pandangan Ibnu Khaldun." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 2, no. 2 (19 Desember 2019): 107–20. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v2i2.993>.

Mohamadon D. Husen, "Islam Dan Filosofi Masyarakat Fakfak," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Volume. 4, Nomor. 1, 25 Mei 2018.

Mu'arrif, "Muhammadiyah dan Pancasila; Ki Bagus Hadikusuma dan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa", *Berita Muhammadiyah*, diakses dari <https://ump.ac.id/>, pada 14 Mei 2023.

Nugroho, Irzak Yuliardy, dan Riani Muarafah Jannati. "Islam Di Spanyol: Jembatan Peradaban Islam Ke Benua Eropa Dan Pengaruhnya Terhadap Renaissance." *HUMANISTIKA : Jurnal Keislaman* 7, no. 2 (30 Juni 2021): 190–219. <https://doi.org/10.55210/humanistika.v7i2.522>.

Nursyarief, Aisyah. "Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah (Perspektif Kerajaan Islam)." *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 17, no. 2 (15 Desember 2014): 256–71. <https://doi.org/10.24252/lp.2014v17n2a8>.

Pairin, "Sejarah Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam", *Jurnal Shautut Tarbiyah*, Volume. 18, Nomor. 2, 2012.

Permana, Rahayu. "Sejarah Masuknya Islam Ke Indonesia." *Jurnal Dinus* 01, no. 01 (2015): 1–27.

Qisthi Faradina Ilma Mahnani, dkk, "Islam dan Politik di Indonesia (Perspektif Sejarah)", *Al-Isnad; Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, Volume. 1, Nomor. 2, Juni 2022.

Rahayu Permana, "Sejarah Masuknya Islam Ke Indonesia," *Jurnal Dinus* Volume. 01, Nomor. 01, 2015.

Saifullah, Saifullah. "Renaissance Dan Humanisme Sebagai Jembatan Lahirnya Filsafat Modern." *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (1 Desember 2014): 133–44. <https://doi.org/10.24014/jush.v22i2.731>.

Sasmita dan Edi Rosman, "Implementasi Politik Hukum Islam Dalam Perumusan Piagam Jakarta", *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Volume. 2, Nomor. 1, Januari-Juni 2018.

Sofyan Rofi, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Taufik Abdullah, et.al, *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia; Akar Historis dan Awal Pembentukan Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2015.

Toto Suharto, “Indonesianisasi Islam; Penguatan Islam Moderat Dalam Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Tahir*, Volume. 17, Nomor. 1, Mei 2017.

Zudi Setiawan, “Peran Tokoh Nahdhatul Ulama Dalam Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Spektrum*, Volume. 18, Nomor. 2, 2021.